

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pertahanan dan keamanan menjadi suatu simbol usaha dalam menjaga eksistensi suatu negara. Sistem pertahanan yang kuat selayaknya dapat menjadi benteng dalam menghalau berbagai ancaman dan serangan yang datang dari luar. Dapat dilihat dari beberapa negara yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, mereka memiliki kharisma di mata internasional. Negara adidaya (*superpower state*) menempati posisi sebagai pemimpin dalam sistem internasional dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesepakatan dan memasukan kepentingannya dalam proyek kekuatan dengan lingkup seluruh dunia yang semata-mata untuk menjaga kepentingan negaranya. Negara adidaya tersebut diantaranya adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris.¹ Pandangan dunia internasional terhadap negara yang memiliki pertahanan yang kuat berbeda dengan negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang biasa. Negara dengan sistem pertahanan yang kuat memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan (konsensus) dalam lingkup internasional, seperti di daerah yang rawan konflik misalnya.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Selat Taiwan dipicu dengan permintaan Taiwan akan persenjataan canggih dari Amerika Serikat. Melalui

¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Superpower>. Diakses tanggal 16 Februari 2009 pukul 14.00.

persenjataan tersebut, Taiwan berusaha untuk membentuk *image* negara yang memiliki *power* (kekuasaan). Seperti definisi *power* yang dikemukakan oleh Charles P. Kindleberger, yaitu kekuasaan yang bisa digunakan secara efisien untuk digunakan secara efektif guna mendukung suatu tujuan khusus.² Melalui pembelian senjata dari AS, Taiwan memiliki tujuan khusus yaitu untuk mendapat dukungan AS dalam *memback-up* pihaknya untuk menghadapi RRC. Tindakan AS dalam memenuhi permintaan persenjataan Taiwan ternyata menuai kecaman yang datang dari RRC (Republik Rakyat Cina). Hal tersebut dikarenakan AS dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri RRC mengenai permasalahan Taiwan yang masih menjadi bagian dari wilayah RRC.

Pada tahun 2000-2007, Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui Bian dari *Democratic Progressive Party* (DPP) yang pro terhadap kemerdekaan Taiwan.³ Melalui kesempatan tersebut, DPP sebagai partai yang menang dalam pemilu memberi pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Taiwan. Hal ini berpengaruh pada kehidupan Taiwan baik ke dalam maupun ke luar, dan hal inilah yang membedakan pemerintahannya dengan pemerintahan sebelumnya.

² James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Teori-Teori Hubungan Internasional* terjemahan M. Amien Rais, Harwanto Dahlan, dan Tulus Warsito, Yogyakarta, UMY, 1995, hal 174.

³Kerry Dumbaugh, “ CRS Report for Congress. Taiwan: Recent Developments and U.S. Policy Choices”, dalam <http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL33510.pdf>, diakses tanggal 14 Februari 2009 pukul 10.00. Ringkasan: Sepanjang masa jabatannya, Presiden Taiwan Chen Shui Bian, merupakan anggota Partai Demokratik Progresif (PDP), memungkiri konsep kunci yang menjadi tujuan utama Partai Nasional (KMT) –“status quo” dimana hanya ada satu Cina dan Taiwan menjadi bagian darinya – dan dia menyatakan hal yang berlawanan bahwa Taiwan siap “merdeka dan menjadi negara yang berdaulat”.

Dari sedikit pemaparan diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti tentang “Pengaruh Pembelian Senjata Taiwan dari Amerika Serikat Terhadap Hubungan Antar-Selat Pada Tahun 2000-2007” sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat:

1. Mengidentifikasi pengaruh pembelian senjata Taiwan dari Amerika Serikat terhadap hubungan RRC-Taiwan tahun 2000-2007.
2. Mengetahui jenis senjata apa saja yang mengalir sekitar tahun 2000-2007 dari AS ke Taiwan.
3. Melengkapi tugas akhir dalam memperoleh gelar kesarjanaan sekaligus menerapkan aplikasi teori yang diperoleh penulis selama menempuh pendidikan S-1.

C. Latar Belakang

Perekonomian Taiwan yang terus meningkat⁴ memberi dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah aspek pertahanan keamanan dan politik. Hingga sekitar tahun 2000an, persenjataan Taiwan meningkat

⁴ Wayne M. Morrison, “*Taiwan’s Accession to the WTO and Its Economic Relations with The United States and China*”, diakses tanggal 21 Februari 2009 pukul 13.00 dalam http://www.policyarchive.org/bitstream/handle/10207/3391/RS20638_20050414.pdf?sequence=7. *In 2004, Taiwan was the 8th largest U.S. trading partner (\$56 billion), 9th largest export market (\$21.7 billion) and 8th largest import source (\$34.6 billion).*

secara signifikan seperti pada peluru kendali anti-balistik⁵ yang didapat dari hasil kerjasama dengan AS, diantaranya adalah Tien Kung I (Sky Bow I), Tien Kung II (Sky Bow II), Tien Chien I (Sky Sword I), Tien Chien II (Sky Sword II).⁶ Selain itu, tidak kalah penting, Taiwan juga memfokuskan pada peningkatan mutu dan jumlah perlengkapan pertahanan darat, laut, dan udara.

Kemajuan perekonomian Taiwan memotivasi Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan dalam mengajukan anggaran belanja persenjataan sebesar NT\$ 700 miliar (US\$ 21 miliar) hingga 10 tahun mendatang terhitung sejak tahun 2001.⁷ Anggaran tersebut diantaranya akan dialokasikan pada pembelian beberapa perlengkapan persenjataan seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel ini memberikan informasi mengenai penjualan senjata AS untuk berbagai perlengkapan pertahanan ke Taiwan selama tahun 2000-2007, penjualan ini telah melalui persetujuan Presiden AS dan diumumkan secara formal kepada Kongres AS sejak tahun 1990. Daftar ini dipublikasikan secara terbuka karena telah diumumkan oleh pemerintah sebagai laporan pers. Ini merupakan program FMS (Foreign Military Sales) lingkup antar-pemerintahan suatu negara. Sebelum Departemen Pertahanan AS mengabari lewat *Letters of Offer and Acceptance*, presiden harus memberitahukan

⁵www.wikiped.com/wikiped/jenis%20Peluru_kendali.htm. Diakses tanggal 9 Februari 2009 pukul 10.44. Peluru kendali anti-balistik adalah peluru kendali dengan fungsi utama untuk menyergap dan menghancurkan peluru kendali balistik lawan.

⁶<http://post.mnd.gov.tw/english/Publish.aspx?cnid=514&p=729>. Diakses tanggal 18 Januari 2009 pukul 11.00.

⁷Shirley A. Kan, "Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990" Report for Congress. <http://fpc.state.gov/documents/organization/16159.pdf>. Diakses tanggal 13 Februari 2009 pukul 15.39.

FMS kepada Kongres sebagai syarat dari *Arms Export Control Act* (AECA). Tabel ini mencakup tanggal pengumuman, perlengkapan utama yang dibutuhkan, dan jumlah unit permintaan, serta estimasi dana setiap paket senjata.⁸

⁸ CRS Report for Congress, *Taiwan: Major US Arms Sales Since 1990*. Shirley A. Kan, <http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf>. diakses pada tanggal 13 Februari 2009 pukul 15.50.

Tabel 1.1
Daftar Penjualan Senjata AS (belum semua terkirim) ke Taiwan Hingga Tahun 2007

Date of Notification	Major items or service as proposed (usually part of package of related support)	Value of package (\$ million)
2000		
03/02	Modernization of TPS-43F air defense radar to TPS-75V configuration	96
03/02	(162) HAWK intercept guided air defense missiles	106
06/07	(39) Pathfinder/Sharpshooter navigation and targeting pods for F-16 fighters	234
06/07	(48) AN/ALQ-184 ECM pods for F-16s	122
09/28	(146) M109A5 howitzers, 152 SINGARS radio systems	405
09/28	(200) AIM-120C Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) for F-16 fighters	150
09/28	(71) RGM-84L Harpoon anti-ship missiles	240
09/28	Improved Mobile Subscriber Equipment (IMSE) communication system	513
2001		
07/18	(50) Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS) terminals (a version of Link 16) for data links between aircraft, ships, and ground stations	725
09/05	(40) AGM-65G Maverick air-to-ground missiles for F-16s	18
10/26	(40) Javelin anti-tank missiles system	51
10/30	Logistic support for spare parts for F-5E/F, C-130H, F-16A/B, and IDF aircraft	288
2002		
06/04	(3) AN/MPN-14 air traffic control radars	108
09/04	(54) AAV7A1 assault amphibious vehicles	250
09/04	Maintenance of material and spare parts for aircraft, radar system, AMRAAMs and other system	174
09/04	(182) AIM-9M-1/2 sidewinder air-to-air missiles	36
09/04	(449) AGM-114M3 Hellfire II anti-armor missiles to equip AH-1W and OH-59D helicopters	60
10/11	(290) TOW-2B anti-tank missiles	18
11/21	(4) Kidd class destroyers	875
2003		
09/24	Multi-functional Information Distribution Systems (for Po Sheng C4SIR data link upgrades)	775
2004		
03/30	(2) Ultra High Frequency Long Range Early Warning Radars	1,776
2005		
10/25	(10) AIM-9M Sidewinder and (5) AIM-7M Sparrow air-to-missiles; continuation of pilot training and logistics support for F-16 fighters at Luke AFB, AZ	280
2007		
02/28	(218) AMRAAMs and (235) Maverick air-to-ground missiles for F-16 fighters	421
08/08	(60) AGM-84L Harpoon Block II anti-ship missiles	125
09/12	(144) SM-2 Block III A Standard air-defense missiles (for Kidd-Class Destroyers)	272
09/12	(12) P-3C Maritime patrol/ASW aircraft	1,960
11/09	Patriot Configuration 2 ground system upgrades	939

Sumber: CRS Report for Congress. Taiwan: Major U.S Arms Sales Since 1990. Shirley A. Kan, specialist in Asian Security Affairs. Foreign Affairs, Defense, and Trade Division.
<http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf>. Diakses tanggal 13 Februari 2009 pukul 15.50.

Meskipun AS adalah negara pengekspor senjata terbesar Taiwan namun tidak semua jenis senjata yang diperlukan Taiwan dipenuhi oleh pemerintah AS. Perlu adanya beberapa pertimbangan yang matang dari berbagai segi oleh para pemegang kekuasaan sehingga permintaan persenjataan tersebut dapat disetujui dan dilanjutkan dengan proses pengiriman senjata ke Taiwan. Dengan begitu, secara tidak langsung Taiwan akan menjadi pangsa pasar terbesar AS selama beberapa tahun ke depan terutama dalam memenuhi kebutuhan pertahanan Taiwan secara berkelanjutan. Selain terpenuhinya kebutuhan pertahanan, peningkatan kekuatan militer Taiwan dapat dilihat dari kemampuan personel tentaranya (*softskill*) yang terus dikembangkan Taiwan bersama AS melalui pelatihan khusus.

Kerjasama yang terjalin antara Republik Cina (Taiwan) dan AS telah terbilang cukup lama dan kental. Berawal dari bantuan AS untuk Partai Nasionalis Cina (Kuomintang) dalam mengobarkan semangat pro demokrasi di Cina Daratan, hingga Republik Cina memindahkan kekuasaannya ke Pulau Formosa karena kegagalannya mempertahankan pemerintahan nasionalis, AS tetap menjaga hubungannya bersama Republik Cina hingga kini. Hal ini terjadi karena AS mendukung proses demokratisasi yang berlangsung disana dan membuktikan bahwa demokrasi tidak mengenal kultur ataupun letak wilayah.

Pada tahun 2000-2008, AS dan Taiwan memiliki pemimpin yang sama selama dua periode pemerintahan berturut-turut, Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui Bian dan AS yang dipimpin oleh George W. Bush. Pada masa pemerintahan kedua

pemimpin tersebut cukup banyak gejolak perpolitikan yang terjadi namun tidak menghentikan kerjasama yang dibangun. Layaknya dua pihak yang saling membutuhkan, hubungan kedua pihak pun terjalin cukup solid meskipun pada kenyataannya mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan benturan berupa permasalahan klasik mengenai kebijakan Taiwan dalam memerdekakan diri yang mendapat kecaman dari pemerintah RRC.

Sebagaimana hubungan AS terhadap Taiwan yang masih terjaga dengan baik, AS pun berusaha untuk terus menjaga hubungan baiknya bersama RRC. Diantaranya adalah AS tetap mengakui *One China Policy*. Namun sikapnya tidak mencerminkan bahwa negaranya hanya mengakui RRC sebagai satu-satunya negara yang sah di Cina, karena pada kenyataannya AS menjalin hubungan intim dengan Taiwan mengenai penjualan senjata. Seperti diketahui bahwa Taiwan merupakan *issue* sensitif bagi RRC karena Taiwan masih menjadi salah satu propinsi RRC sehingga dengan kerjasama yang terjalin antara AS-Taiwan berarti telah melangkahi wewenang RRC atas Taiwan dengan mencampuri urusan dalam negeri RRC.

AS pada dasarnya sama sekali tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Dapat dilihat pada *Five Principles*⁹ yang dikemukakan oleh Presiden Richard Nixon pada

⁹ Shirley A. Kan. *China/Taiwan: Evolution of the "One China" Policy- Key statements from Washington, Beijing, and Taipei.* p. 33. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30341.pdf>. Diakses tanggal 2 April 2009 pukul 12.29. Nixon Five Principles: 1) *There is one China, and Taiwan is a part of China.* 2) *We have not and will not support any Taiwan independence movement.* 3) *We will, to the extent we are able, use our influence to discourage Japan from moving into Taiwan as our presence becomes less, and also discourage Japan from supporting a Taiwan independence movement.* 4) *We will support any peaceful resolution of the Taiwan issue that can be worked out. And related to that point, we will not support any military attempts by the Government on Taiwan to resort to a military return to the Mainland.* 5) *We seek the normalization of relations with the People's Republic.*

tahun 1972. Hal tersebut masih dipegang oleh pemerintahan AS hingga pemerintahan George W. Bush yang cenderung keras namun tetap mengimplementasikan *One China Policy* seperti pendahulunya. Kenyataan yang terjadi, justru mengakibatkan AS tidak memiliki hubungan yang mulus, baik dengan RRC maupun Taiwan.

Keputusan AS dalam menyetujui pemenuhan perlengkapan senjata ke Taiwan tidak lain karena AS telah menyetujui kontrak kerjasama dengan Taiwan melalui *Taiwan Relations Act* (TRA) yang memberi AS tanggungjawab dalam menjaga dan menerapkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihaknya bersama Taiwan. TRA sendiri merupakan undang-undang yang mengesahkan AS dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik serta mengenakan kebijakan luar negeri AS dalam hubungannya dengan Taiwan, dan kesepakatan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Melalui kesepakatan tersebut, ternyata menjadi senjata Taiwan agar AS dapat mendukung usaha Taiwan dalam melepaskan diri dari pengaruh RRC dan berdiri menjadi suatu negara sendiri yang terpisah dari campur tangan RRC. Diharapkan dengan terpenuhinya sistem pertahanan-diri yang memadai serta dukungan yang AS berikan pada Taiwan dapat memudahkan Taiwan untuk mewujudkan kemerdekaannya secara legal.

Melalui sikap AS dalam upaya memenuhi kebutuhan persenjataan yang dibutuhkan Taiwan membuat pemerintah RRC geram dan tidak terima dengan keputusan yang diambil karena dengan begitu pemerintah AS telah membelot dari kesepakatan Kebijakan Satu Cina dengan mencampuri urusan dalam negeri RRC. Hal

ini terbukti dari adanya ancaman keras dari Menteri Luar Negeri Cina, Tang Jiaxuan, akan terjadinya “bahaya serius” jika AS terus melanjutkan penjualan senjata canggihnya kepada Taiwan.¹⁰ Hubungan RRC–AS pun mengalami guncangan karena adanya perbedaan pandangan terhadap kerjasama yang dibangun antara AS dan Taiwan.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dengan mengingat keterkaitan dengan judul ini, maka pokok permasalahan yang penulis ajukan adalah Bagaimana pengaruh pembelian senjata Taiwan dari AS terhadap hubungan antar-selat pada tahun 2000-2007?

E. Kerangka Teoretik

Penulis akan menggunakan Konsep Perlombaan Senjata dan Dilema Keamanan serta Konsep Perimbangan Kekuasaan guna membantu dalam menjawab pengaruh apa saja yang ditimbulkan pasca pembelian senjata Taiwan dari AS terhadap hubungan antar-selat.

1. Konsep Perlombaan Senjata dan Dilema Keamanan

Negara-negara (dua pihak di Selat Taiwan) yang bermusuhan terkunci dalam sebuah siklus ketakutan bersama (suatu proses yang disebut pembentukan reaksi

¹⁰ Kompas edisi 8 Maret 2001. Hal: 3. *Naiknya Anggaran Pertahanan Cina.*

permusuhan). Dalam proses ini setiap pihak sama-sama merasa terancam. Kesiagaan defensif salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersenjatai diri sebagai tanggapannya. Semua pihak berusaha saling mengungguli sehingga menumbuhkan perlombaan senjata dan pasukan, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Perlombaan ini menciptakan dilema keamanan. Meskipun satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik bilateral menginginkan perdamaian, cara yang mereka gunakan untuk mencapainya cenderung merusak iklim dan prospek perdamaian itu sendiri.¹¹

Pembelian senjata Taiwan dari AS merupakan salah satu usaha Taiwan dalam memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan guna melindungi diri dari ancaman RRC. Dalam hal ini, Taiwan merasa berhak menentukan keputusannya sendiri sebagai aktor yang menentukan masa depan wilayahnya. Pembelian senjata oleh Taiwan ini didukung oleh perekonomian Taiwan yang meningkat. Namun, hal ini dipandang RRC sebagai suatu hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan keutuhan wilayah Cina dalam usaha RRC mempertahankan propinsi Taiwan. Maka dari itu, RRC berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataannya melalui anggaran pertahanan yang senantiasa meningkat tiap tahunnya.¹² Hal ini membuktikan bahwa RRC berusaha untuk mengimbangi kekuatan persenjataan yang

¹¹Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2*, alihbahasa: Dr. Budiono Kusumohamidjojo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 196-197.

¹²Yahya A. Muhaimin. *Bambu Runcing dan Mesiu*. Hal 85. Tiara Wacana. Yogyakarta. Juni 2008. Hal 85. Tabel perbandingan negara dari tahun 1998-2006.

terus dibangun oleh Taiwan. Pembelian sejumlah persenjataan yang dilakukan oleh Taiwan berawal dari adanya keinginan untuk menjaga keamanan wilayah Taiwan dari RRC namun RRC menganggap Taiwan ingin menyerang RRC, sehingga RRC pun berusaha untuk meningkatkan persenjataannya agar dapat menjaga keutuhan seluruh wilayah Cina dari gerakan separatis Taiwan. Adanya rasa takut dan khawatir akan terancamnya keamanan dan keutuhan wilayah masing-masing menyebabkan kedua pihak di Selat Taiwan saling meningkatkan pertahanannya sehingga pengaruh dari hal ini adalah persaingan kekuatan dan kekuasaan antara RRC dan Taiwan.

2. Konsep Perimbangan Kekuasaan

Dalam sistem internasional ada tiga asumsi dasar mengenai perimbangan kekuasaan. *Pertama*, setiap negara (dalam hal ini Taiwan diartikan sebagai negara) berusaha untuk memaksimalkan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya sendiri. *Kedua*, apabila akumulasi kekuasaan dan kepentingan antarnegara bentrok, maka tercipta kemungkinan konflik internasional. *Ketiga*, untuk meningkatkan potensi kekuasaan masing-masing, negara-negara yang sepemikiran akan membentuk persekutuan, sehingga persaingan antarpersekutuan lebih mewarnai sistem tersebut daripada persaingan antarnegara. Persaingan antarpersekutuan menciptakan keseimbangan, sekalipun ketidakseimbangan itu menguntungkannya.¹³

¹³ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia 2*, alihbahasa: Dr. Budiono Kusumohamidjojo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm.43.

RRC merupakan negara yang memiliki pertahanan yang memadai. Pengaruh dan posisi RRC dalam dunia internasional telah diakui kemampuannya sehingga segala tujuan yang ingin dicapai RRC bukan hal yang sulit untuk diwujudkan namun, hal tersebut tidak berlaku pada penyatuan kembali Cina dalam permasalahan Taiwan. Berbagai macam usaha diplomasi dilakukan guna menyatukan kembali keutuhan wilayah RRC. Di sisi Taiwan sendiri, peningkatan kebutuhan akan persenjataan merupakan suatu bentuk pemaksimalan kekuasaan demi terwujudnya kemerdekaan Taiwan. Oleh karena itu, Taiwan berusaha membeli senjata dari AS karena kurangnya kemampuan Taiwan dalam memproduksi kebutuhan pertahanan sendiri. Selain itu, Taiwan juga berusaha untuk mencari negara kuat dalam mendukung dan membantu terwujudnya cita-cita Taiwan untuk menjadi negara yang merdeka. Pada dasarnya, AS tidak bersekutu dengan Taiwan untuk melawan RRC namun, sebenarnya posisi AS dalam hal ini hanya sebagai penyeimbang (*balancer*) kekuatan Taiwan agar tidak ada ketimpangan kekuasaan. Jika konflik antar-selat ini tidak ditengahi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidakseimbangan kekuasaan sehingga dapat membahayakan dunia internasional mengingat RRC adalah salah satu negara kuat di Asia. Namun, pihak RRC tidak memandang AS telah menengahi konflik antar-selat, bahkan sikap AS ini justru memicu peningkatan ketegangan di wilayah Selat Taiwan, yaitu dengan mencampuri urusan dalam negeri RRC. Tentu hal ini akan berpengaruh pada kelangsungan hubungan antar-selat yang semakin memburuk.

Dalam studi Hubungan Internasional tradisional, perimbangan kekuasaan diukur hanya berdasarkan relativitas militer. Sedangkan konsep Hubungan Internasional modern menyatakan bahwa kesiagaan militer relatif bukan satu-satunya faktor penentu perimbangan kekuasaan. Kecenderungan yang ada saat ini membedakan antara kekuatan militer di satu pihak dan segenap kemampuan memainkan pengaruh internasional di lain pihak, sehingga komponen utama dari perimbangan kekuasaan saat ini adalah kekuatan ekonomi.¹⁴

Kekuatan yang dimiliki Taiwan selain persekutuan atau pencarian dukungan negara kuat sehingga dapat mengimbangi kekuasaan RRC adalah perekonomian yang kuat. Kiprah Taiwan di beberapa organisasi internasional terutama organisasi perdagangan internasional menjadi salah satu potensi kekuatan Taiwan dalam mengimbangi kekuatan yang dimiliki RRC. Politik diplomasi serta peningkatan pendapatan Taiwan merupakan efek positif dari peran serta Taiwan dalam beberapa organisasi internasional dengan berbagai negara dunia. Melalui kekuatan ekonomi tersebut Taiwan dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya dan memiliki peran dalam komunitas internasional sehingga dapat mengimbangi kedudukan RRC sebagai negara yang memiliki potensi yang lebih kuat dalam komunitas internasional. Dengan begitu Taiwan memiliki dukungan dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 40.

F. Hipotesa

Dari uraian diatas diperoleh jawaban sementara mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari pembelian senjata Taiwan dari AS adalah memburuknya hubungan antar-selat.

G. Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengadakan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) pada buku, literatur, kliping-kliping surat kabar/majalah, jurnal, artikel dari internet. Diskusi dengan beberapa orang yang cukup berkompeten tentang keamanan dan persenjataan. Pengolahan materi data berwujud studi kualitatif berdasar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang menjadi bahan bacaan penulis. Jenis analisis yang digunakan penulis berupa induktif karena jawaban dari permasalahan yang diangkat dapat ditemukan diakhir penelitian sebagai suatu dampak atau efek yang disebabkan oleh suatu kasus tertentu.

H. Jangkauan Penelitian

Tulisan ini mencakup tentang pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pembelian senjata yang dilakukan oleh Taiwan dari AS terhadap hubungan antar-selat pada tahun 2000-2007.

I. Sistematika Penulisan

- Bab I: Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoretik, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Bab ini memaparkan tentang kronologi sejarah antar-selat sebelum tahun 2000.
- Bab III: Bab ini menjelaskan tentang motif pembelian senjata Taiwan dari AS serta pertimbangan Pemerintah AS dalam menentukan persenjataan yang dikirim pada tahun 2000-2007.
- Bab IV: Bab ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi di dalam aspek pertahanan keamanan serta politik hubungan antar-selat pasca pembelian senjata Taiwan dari AS di tahun 2000-2007.
- Bab V: Bab ini berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.